

BAB II

KAJIAN TEORETIK

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1 Konsep Fokus Penelitian

Dengan kegiatan penelitian ini harapannya di masa mendatang dapat meningkatkan pendapatan warga, sehingga tercipta ketahanan ekonomi lokal berbasis potensi desa, yang nantinya akan menopang ketahanan ekonomi daerah maupun ketahanan ekonomi nasional, karena kondisi saat ini suatu negara disebut negara yang kuat bukan hanya karena kekuatan militer semata tapi adalah karena memiliki pengaruh kekuatan ekonomi yang sejahtera dan mapan.

Bertitik tolak dari fenomena yang diungkap dalam latar belakang, maka dapat dikemukakan fokus penelitian dengan pernyataan masalah (*problem statement*) sebagai berikut : belum teridentifikasinya potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh desa, dan belum adanya aplikasi jenis pelatihan yang sesuai kebutuhan masyarakat desa, pembangunan, dan inovasi sosial terhadap potensi wilayah setempat di Desa Sengguruh. Oleh karena belum adanya analisis kebutuhan yang tepat berbasis potensi dari Desa Sengguruh itu sendiri yang saat ini sangat diperlukan.

2.1.2 Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*).

Definisi Empowerment atau pemberdayaan menurut Dr Oos M Anwas berarti merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat yang didorong untuk memiliki kemampuan sesuai potensi dan kebutuhannya untuk berdiri tegak di atas kakinya sendiri, serta memiliki daya saing

melalui berbagai kegiatan secara gotong royong.¹⁰ Untuk memahami konsep *empowerment* secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Pemberdayaan menurut Suhendra, pemberdayaan adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi”. Selanjutnya pemberdayaan menurut Jim Ife (dari buku Suhendra, 2006:77) adalah “meningkatkan ke kurang beruntungan (*empowerment aims to increase the power of disadvantage*)”.¹¹

Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*breakdown*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.

Sumber daya manusia dalam hal ini adalah masyarakat yang menjadi subyek pemberdayaan harus mendapatkan porsi perhatian yang sama dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain. Stewart

¹⁰ Oos M. Anwas, Dr., Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, Alfabeta, Bandung. 2014, hal 02

¹¹ Suhendra, K, 2006, Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Alfabeta, hal. 74-75

mengemukakan konsep pemberdayaan sumber daya manusia sebagai berikut :¹²

1. *Enabling* (membuat mampu) adalah memastikan bahwa setiap orang memiliki segala sumber daya yang diperlukan untuk dapat diberdayakan secara penuh, sumber-sumber daya itu pengetahuan dan pengalaman untuk mencapai tujuan yang disepakati.
2. *Facilitating* (memperlancar) merupakan tugas yang diemban oleh manajemen untuk menghilangkan segala macam rintangan, halangan ataupun penundaan yang menghalangi staf untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Halangan yang ditemui dapat berupa rendahnya tingkat pendidikan maupun informasi yang tersedia kurang memadai.
3. *Consulting* (berkonsultasi) adalah manajemen yang memberdayakan ingin menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki untuk kemudian memanfaatkannya. Komunikasi yang menyeluruh diperlukan tidak hanya pada masalah yang sifatnya rutin akan tetapi hal-hal yang bersifat strategis tetap harus dikomunikasikan dengan baik.
4. *Collaborating* (bekerja sama) adalah kerjasama antara seluruh komponen yang terlibat mulai dari tingkat atas atau pengambil kebijakan hingga pelaksana di lapangan menjadi tujuan akhir yang akan membuktikan tidak hanya seberapa besar kecakapan yang dimiliki seorang pemimpin dalam pemberdayaan masyarakat, akan tetapi juga seberapa kuat kemauannya dan diperlukan koordinasi untuk melaksanakannya secara penuh dari setiap program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan.
5. *Mentoring* (membimbing) adalah bertindak sebagai teladan dan pelatih bagi bawahan dan rekan kerja merupakan tahap hidup dan sekaligus sebuah teknik manajemen. Merumuskan permasalahan

¹² Aileen Mitchel Stewart, "Empowering People: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia", (Yogyakarta : Kanisius, 2006), hlm. 77.

dan menemukan pemecahannya dengan bekerja sama dengan orang lain dibandingkan berusaha untuk mengerjaannya sendirian.

Supporting (mendukung) adalah memberikan dukungan yang tepat jauh lebih utama daripada peran kepemimpinan tradisional ataupun pengendalian. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mempermudah berkonsultasi, melatih dan membimbing.

Dari beberapa definisi pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwasanya pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Masyarakat dapat tahu potensi dan permasalahan yang dihadapinya dan mampu menyelesaikannya.

Menurut Prof I Nyoman Sumaryadi¹³, pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi sebagai berikut:

- a. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.
- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, juga sanggup berperan serta dalam pengembangan di masyarakat.

¹³ I Nyoman Sumaryadi, Sosiologi Pemerintahan ; Dari Prespektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, 2005 (Generasi Ilmu) hal. 11

Menurut Prof. Widjaja yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.¹⁴

Dari pendapat tersebut maka menurut peneliti pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan cara pengembangan potensi yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat memerlukan pendampingan untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai potensi dan kemampuan yang mereka miliki.

Popularitas istilah “Pembedayaan” tidak sebanding dengan realisasinya, yang bahkan di negara kita Indonesia sendiri sampai ada satu Kementerian yang menangani Pemberdayaan, sebut saja menteri Pemberdayaan Perempuan”, bahkan di level Pemerintah Daerah terdapat Badan yang menangani Pemberdayaan yaitu Bapermas atau Badan Pemberdayaan Masyarakat yang menunjukkan arti pentingnya pemberdayaan itu sendiri. Kegiatan pemberdayaan bukan sekedar semudah membalikkan telapak tangan, kegiatan pemberdayaan bukan sekedar membangun sesuatu, memberikan pelatihan ketrampilan, melakukan pendampingan, memberikan sumbangan atau hadiah, atau bentuk-bentuk kegiatan lainnya.

¹⁴ Widjaya, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, 2009 (Raja Grafindo Persada), hal. 169

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri di atas kakinya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya. Bentuk pemberdayaan perlu sesuai dengan potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat local atau masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat bukanlah bentuk pembangunan yang bersifat top down.

Kesimpulannya Pemberdayaan masyarakat hakekatnya mengubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat. .

2.1.3 Potensi Wilayah (Potensial Region)

Potensi secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mempunyai arti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya dan wilayah dalam hal ini bermakna lingkungan daerah (propinsi, kabupaten, kecamatan atau desa),¹⁵ dan hal itu bisa berarti sesuatu kemampuan yang sudah dimaksimalkan maupun kemampuan yang belum tergali atau belum tersadari ada dan melekat di wilayahnya sehingga belum dimanfaatkan keberadaanya.

Potensi ekonomi daerah didefinisikan oleh Suparmoko sebagai kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan bagi generasi selanjutnya.¹⁶

¹⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/potensi>, diakses pada tanggal 6 Juli 2018.

¹⁶Nailatul Husna, Irwan Noor, Mochammad Rozikin, Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal untuk Memperkuat Daya Saing Daerah di Kabupaten Gresik, Universitas Brawijaya, Malang, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No. 1.

Untuk keperluan ini bisa dipilih wilayah tertentu, misalnya meliputi potensi wilayah desa. Jadi, potensi desa mengandung arti kemampuan yang dimiliki oleh desa yang memungkinkan untuk dikembangkan. Dan kemampuan yang dimiliki suatu lingkungan tertentu misalnya desa yang mungkin untuk dikembangkan tersebut bisa jadi akan tetap selamanya menjadi “potensi” bila tidak disadari dan diolah, atau didayagunakan menjadi suatu “realita” berwujud kemanfaatannya oleh dan untuk masyarakat.

Karena itu kesimpulannya potensi wilayah memerlukan upaya-upaya tertentu agar membuatnya bermanfaat bagi masyarakat. Diperlukan identifikasi pengenalan potensi dan penelusuran lebih jauh tentang potensi itu sendiri, sehingga masyarakat mengenal potensi yang dimiliki dan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya tersebut menjadi kekuatan yang dapat menambah kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

2.1.4 Ketahanan Ekonomi Daerah (*Economic Resilience of the Region*)

Pengertian Ketahanan Nasional menurut Lembaga Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri langsung atau tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Istilah ketahanan nasional sudah dikenal sejak awal tahun 1960-an. Pada saat itu ketahanan nasional belum diberi definisi tertentu dan belum disusun dalam suatu konsepsi yang lengkap. Istilah ketahanan nasional dipakai dalam rangka pembahasan masalah pembinaan teritorial atau masalah wilayah Pertahanan keamanan pada umumnya.

Definisi Lemhannas tentang Ketahanan Nasional baru diperkenalkan pertama kali pada tahun 1968. Pada waktu itu Lemhannas mendefinisikan ketahanan nasional sebagai keuletan dan daya tahan bangsa dalam menghadapi segala kekuatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia. Pengertian tersebut direvisi pada tahun 1969, menjadi keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Hingga saat ini pengertian tersebut menjadi rujukan yang digunakan seluruh elemen bangsa.

Sedangkan “Ketahanan Ekonomi” menurut Wahidin (2005:148) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan ekonomi sebagai berikut.

1. Bumi dan Sumber Alam

Kondisi geografis suatu negara akan mempengaruhi transformasi sumber kekayaan alam, maupun untuk distribusi hasil produksi. Sedangkan sumber kekayaan alam suatu negara akan dapat mempengaruhi penyediaan bahan baku bagi kepentingan produksi.

2. Tenaga Kerja

Pertambahan penduduk akan mengakibatkan bertambahnya usia kerja. Tapi, jika tidak disertai penambahan lapangan kerja tidak akan dapat meningkatkan produktivitas, bahkan akan meningkatkan jumlah pengangguran. Untuk memanfaatkan tenaga kerja yang besar tersebut agar dapat meningkatkan produksi ditempuh kebijakan nasional dengan transmigrasi ke

daerah yang mempunyai potensi tanah dan alam untuk diproduksi. Juga dengan mendirikan pabrik-pabrik industri secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada.

3. Modal

Modal sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi dan distribusi hasil produksi. Modal dapat diperoleh dari dua cara yaitu:

- a. Modal dari luar negeri berupa pinjaman luar negeri, investor asing.
- b. Modal dari dalam negeri berupa pajak, tabungan masyarakat, pendapatan masyarakat, investor dalam negeri.

4. Industrialisasi

Industrialisasi berarti mengelola barang devisa secara modern dengan menggunakan teknologi modern akan dapat meningkatkan hasil produksi barang dan jasa baik untuk keperluan konsumen di dalam negeri maupun untuk ekspor. Industrialisasi juga akan meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduk. Tapi yang perlu diperhatikan juga adalah dampak dari industrialisasi itu sendiri, dimana dengan adanya industrialisasi tidak berakibat pada rusaknya lingkungan dan alam sekitarnya.

5. Teknologi

Teknologi yang tepat akan dapat meningkatkan hasil produksi barang dan jasa serta memperlancar distribusi hasil produksi tersebut. Penggunaan teknologi mutakhir harus disertai pembinaan sikap mental bangsa untuk menerima teknologi tersebut yang harus berdampak sosial. Teknologi yang juga menopang pada sektor-sektor ketahanan bangsa juga perlu digiatkan, misalnya ketahanan pangan atau sektor pertanian, perkebunan dan perikanan atau laut.

6. Hubungan ekonomi luar negeri

Hubungan ekonomi dengan luar negara lain diperlukan untuk saling memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh kemampuan negara masing-masing. Untuk meningkatkan produksi diperlukan bahan baku dan teknologi yang sebagian harus dipenuhi dari luar negeri. Demikian pula pada saat yang sama negara lain memerlukan hal yang sama. Oleh karena itu diperlukan interaksi positif saling menguntungkan, baik kerjasama secara bilateral, regional maupun internasional.

7. Prasarana

Prasarana di bidang ekonomi adalah sesuatu yang diperlukan untuk menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa serta merupakan faktor vital bagi pertumbuhan dan kelangsungan ekonomi negara dan bangsa. Tersedianya sarana dan prasarana ekonomi yang memadai semacam infrastruktur dan jalan raya akan meningkatkan ketahanan nasional di bidang ekonomi.

8. Manajemen

Kemampuan manajerial yang baik akan dapat mengelola ekonomi secara efisien sehingga dapat meningkatkan hasil produksi dan memperlancar distribusi barang dan jasa hasil produksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur negara dan swasta di bidang manajemen agar dapat meningkatkan ketahanan nasional di bidang ekonomi.¹⁷

Ketahanan nasional di bidang ekonomi adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun

¹⁷ Samsul Wahidin, *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2005, hal. 148

tidak langsung akan membahayakan kehidupan ekonomi bangsa dan negara.

Dari keseluruhan faktor ketahanan diatas kesimpulannya apabila dapat diwujudkan oleh suatu wilayah, baik itu wilayah kecil semisal desa dan berkembang ke wilayah yang lebih luas lagi kecamatan dan akhirnya akan terwujudnya ketahanan nasional di tingkat Kabupaten dan Provinsi yang akan mendorong ketahanan nasional di tingkat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.5 **Ekonomi Pertahanan (*Deffence Economic*)**

Ekonomi Pertahanan adalah kajian ekonomi yang melihat dari sisi pertahanan dan keamanan negara secara menyeluruh. Menurut Kodrat Wibowo (FE Unpad) Ekonomi Pertahanan adalah multidisiplin yang menggabungkan strategi pertahanan negara, pemikiran politik dan Teori Ekonomi Makro dan Mikro dalam mempelajari sebuah sistem pertahanan, terkait kekuatan militer baik di masa perang maupun di masa damai.¹⁸

Ekonomi pertahanan merupakan cabang ilmu yang menerapkan ilmu ekonomi pada masalah pertahanan negara. Seperti halnya ekonomi pembangunan, ekonomi sumber daya, ekonomi politik, maupun ekonomi lingkungan, ekonomi pertahanan mengaplikasikan ilmu ekonomi yang sudah digunakan jauh ke dalam bidang-bidang tertentu, dalam hal ini pertahanan negara.

Pemberdayaan potensi pertahanan diarahkan untuk dapat mendukung transformasi sumber daya dan sarana prasarana nasional sebagai kekuatan pertahanan dengan menyinergikan fungsi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam:

¹⁸ Purnomo Yusciantoro, *Ekonomi Pertahanan*, Gramedia Jakarta, Pustaka Utama.2014, Hal. 7

- a. Pembinaan SDM; Pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan SDB serta sarana dan prasarana nasional; Penerapan nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia maupun yang bersifat universal;
- b. Penguasaan teknologi;
- c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran; dan
- d. Penataan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota yang terintegrasi dengan penataan ruang wilayah pertahanan.

Hakikat pertahanan negara adalah pertahanan negara yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara¹⁹.

Dimensi ekonomi merupakan salah satu dimensi ancaman pertahanan negara yang dapat mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Permasalahan utama dalam bidang ekonomi yang dapat mengganggu pertahanan negara adalah ketidakadilan dalam distribusi atau pemerataan hasil pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi, yang pada gilirannya akan memicu gejala disintegrasi bangsa.

Masalah ketimpangan ekonomi yang dihadapi saat ini: kesenjangan antar daerah sebagai konsekuensi dari terkonsentrasinya kegiatan perekonomian di Pulau Jawa dan Bali. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat (pusat pertumbuhan) dengan intensitas yang berbeda dan tidak nampak di berbagai daerah pada waktu yang bersamaan. Akibatnya terdapat daerah relatif maju yang akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif.

¹⁹ Purnomo [Yusgiantoro](#), *Ekonomi Pertahanan: Teori & Praktik*. Jakarta: [Gramedia Pustaka Utama](#), 2014

Pertumbuhan ekonomi suatu negara pada umumnya dilihat dari sisi pendapatan dan pengeluaran negara tersebut, namun saat ini pertumbuhan ekonomi selain di dasari oleh pertumbuhan dan pengeluaran ekonomi juga bisa dilihat dari berbagai aspek lain. Salah satu bidang aspek yang menerapkan ilmu ekonomi dalam perkembangannya adalah ilmu pertahanan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan salah satu faktor dalam pertahanan negara, yang berkaitan dengan pengeluaran maupun pembelanjaan militer.

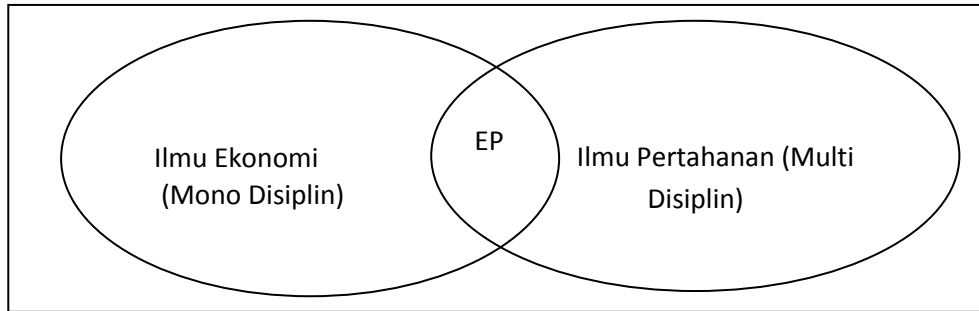
Semakin kuat perekonomian Nasional maka semakin mampu negara untuk membiayai pembangunan pertahanan, semakin kuat perekonomian keluarga maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga negara semakin siap dalam menghadapi ancaman dan resiko perang.

Ruang lingkup dari Ekonomi Pertahanan adalah meliputi ekonomi mikro, ekonomi makro, hukum ekonomi, ekonomi politik, politik ekonomi, ekonomi pembangunan, industri pertahanan dan pertahanan negara. Tujuan dari Ekonomi Pertahanan yaitu mengkaji berbagai fenomena berkaitan dengan potensi dan ancaman terhadap kedaulatan ekonomi nasional serta strategi pemecahannya untuk mendukung pertahanan negara. Definisi dari Ekonomi Pertahanan adalah studi tentang Ekonomi Berbasis Pertahanan yang mengkaji berbagai fenomena berkaitan dengan potensi dan ancaman terhadap kedaulatan ekonomi nasional serta bagaimana strategi pemecahannya untuk mendukung pertahanan negara.

Dengan adanya subsidi pupuk produktifitas pangan menjadi meningkat, dengan produktifitas meningkat maka pendapatan petani akan meningkat, selanjutnya dengan pendapatan petani meningkat menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat, dengan pertumbuhan ekonomi meningkat menyebabkan tingkat pembayaran pajak meningkat, dengan pajak meningkat alokasi APBN juga meningkat, pada akhirnya alokasi untuk belanja pertahanan juga meningkat.

Keterkaitan hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu pertahanan lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar. 2.4 Ekonomi Pertahanan : Ilmu Ekonomi vs Ilmu Pertahanan



Sumber: Data diolah, 2018

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian tesis sangatlah penting untuk membahas mengenai penelitian sebelumnya yang dianggap sesuai dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti. Rujukan ini diharapkan akan memberikan penjelasan yang lebih terkait penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya yang telah melakukan penelitian diantaranya, yaitu;

a. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Widowati Dosen Tetap Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dengan judul Pengaruh Pemberdayaan Terhadap Karakteristik Sosial-Ekonomi Petani Cabai Merah di Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2016. Bertujuan untuk menganalisis keberhasilan pemberdayaan dan menganalisis pengaruh pemberdayaan terhadap karakteristik sosial-ekonomi petani cabai merah (umur, pendidikan, pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, dan partisipasi). Penelitian dilaksanakan pada petani cabai merah di Desa Sukoharjo

Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut terdapat program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan CV Cabai Merah. Metode penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif dengan studi kasus. Pengambilan contoh menggunakan Simple Random Sampling sejumlah 30 petani. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara berbasis kuesioner. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan kurang berhasil. Karakteristik sosial-ekonomi petani cabai yang berpengaruh adalah umur, pendapatan, dan partisipasi terhadap pemberdayaan. Karakteristik sosial-ekonomi petani cabai yang tidak berpengaruh adalah pendidikan dan jumlah tanggungan keluarga terhadap pemberdayaan masyarakat.

b. Penelitian lainnya dilakukan oleh Kharis Ragil Triyanto pada tahun 2016 yang berjudul “Penelusuran Kebutuhan Secara Apresiatif (*Appreciative Inquiry*) di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Kolikapa Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Program Studi Magister Agribisnis, Program Pasca Sarjana, Universitas Udayana Bali. Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif Mix Method pendekatan pengembangan model yang menunjukkan bahwa pentingnya Penelusuran Kebutuhan Pelatihan dengan pendekatan apresiatif yang dilakukan di Unit Pemukiman Transmigrasi Kolikapa Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengembangan yang dilakukan berkaitan dengan model Penelusuran Kebutuhan Masyarakat di daerah Unit Pemukiman Kolikapa atau yang merupakan Desa Persiapan sebelum diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Daerah dan berubah menjadi Desa. Daerah Transmigrasi atau

Transmigrasi Lokal Unit Pemukiman Transmigrasi Kolikapa atau biasa disebut dengan UPT Kolikapa masih menjadi binaan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri setelah 5 (lima) tahun pembinaan dan berubah statusnya menjadi Desa definitif. Dilakukannya penelusuran ini diharapkan akan memberikan kemampuan dari UPT Kolikapa dalam merencanakan Pembangunan kedepan dengan melihat potensi yang dimiliki, sehingga berbasis potensi yang ada di masyarakatnya.

c. Penelitian lainnya adalah yang dilakukan oleh Edna A. Robidas dengan Judul *The Relationship Between Community Gardening and Empowerment : a Study of Los Angeles Gardens*, mahasiswa Fakultas Politeknik Universitas Negeri California, Pomona. Dilaksanakan pada Tahun 2017 dengan hasil menunjukkan hubungan yang jelas antara kebun masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat, namun penelitian ini tidak mampu untuk menentukan kausalitas, dengan kata lain, apakah kebun menciptakan pemberdayaan, atau Mereka yang terlibat dalam kebun masyarakat secara maksimal sudah diberdayakan. Untuk memaksimalkan dampak kebun pada pemberdayaan, arsitek lansekap dan praktisi kebun memiliki ruang untuk kegiatan tersebut agar berkontribusi tinggi terhadap pemberdayaan, seperti pengetahuan sharing, melalui organisasi program dan pendukung. Mereka juga harus berusaha untuk memastikan proses partisipatif di sekitar penandatanganan ruang semacam itu benar-benar menemukan kekuatan pengambilan keputusan dan kontrol dalam masyarakat.

d. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Dwiko Maxi Rianto dengan judul “Pemberdayaan masyarakat melalui program keterampilan sentra kriya oleh rumah pintar atsiri Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor” tahun 2017. Jurusan Fakultas Ilmu

Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Program Keterampilan sentra kriya merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Rumah Pintar Atsiri. Program ini dibuat dalam rangka mengurangi dan mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Rumah Pintar Atsiri adalah salah satu lembaga atau LSM yang berperan dalam menaungi masyarakat yang lemah kemudian diberikan pelatihan dan pendidikan sehingga mampu diberdayakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan proses pemberdayaan masyarakat melalui program keterampilan yang dilakukan dengan proses kemitraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data secara mendalam agar segala tujuan dalam penelitian ini dapat terjawab. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori tahapan pemberdayaan menurut Isbandi Rukminto Adi, bahwa ada tujuh tahapan yang terdiri atas: Tahapan Persiapan, Tahapan Pengkajian, Tahapan Perencanaan Alternatif Program, Tahapan Pemformulasian Rencana Aksi, Tahapan Pelaksanaan Program, Tahapan Evaluasi dan Tahapan Terminasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program keterampilan sentra kriya oleh Rumah Pintar Atsiri sudah melalui tahapan pemberdayaan. Tahapan persiapan dimulai dari persiapan petugas yang ditunjuk oleh LSM Rumah Pintar Atsiri untuk menjadi petugas pelaksana dan persiapan lapangan yang menjadi sasaran penerima program adalah Desa Ragajaya. Tahapan pengkajian dengan mengkaji permasalahan yang ada di masyarakat. Tahapan perencanaan alternatif program, dimana pada tahap ini petugas

memberikan alternatif program seperti berbagai macam keterampilan sentra kriya. Tahap pemformulasian rencana aksi pada tahapan ini program yang dilakukan adalah program pembuatan kue kering dengan segala jenis kue kering dan minuman jamu tradisional dalam hal ini kunyit asam. serta merumuskan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Tahapan pelaksanaan dimana pelaksanaannya memiliki hambatan pada penerima program terkait masalah waktu dan modal. Tahap evaluasi ini merupakan evaluasi proses dengan memperhatikan perubahan keseluruhan dampak dari program yang telah dilakukan dari tahap persiapan sampai pelaksanaan dan untuk tahap terminasi, Rumah Pintar Atsiri melihat penerima program belum dapat dilepas dalam menjalankan program keterampilan sentra kriya dan masih perlu dibina serta dibimbing. Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

e. Penelitian lainnya dilakukan oleh Rivan Varid Anbiya Mahasiswa Program Magister Pertahanan Program Studi Ekonomi Pertahanan di Universitas Pertahanan Bogor dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penggunaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Tahun 2016). Penelitian dilaksanakan pada Tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, mendeskripsikan proses pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat, mendeskripsikan peran stakeholder dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan dan pemanfaatan Dana Desa secara maksimal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif,

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tangerang mampu memberikan gambaran bagi pemerintah dalam melakukan penerapan dana desa, serta dana desa dapat memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Tabel 2.1 Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu

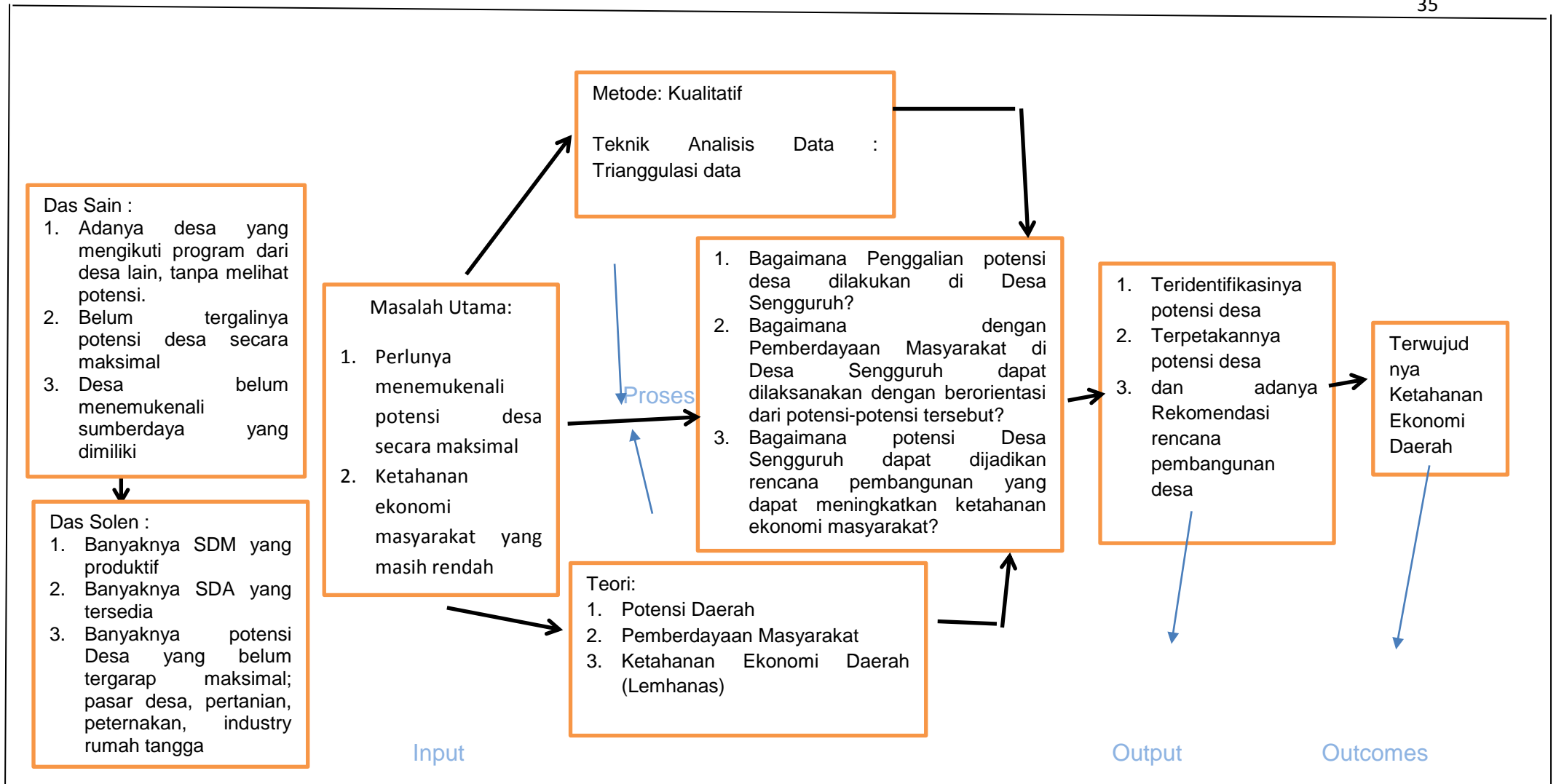
No	Penulis	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Indah Widowati Jurnal Tahun 2016	dengan judul Pengaruh Pemberdayaan Terhadap Karakteristik Sosial-Ekonomi Petani Cabai Merah di Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan kurang berhasil. Karakteristik sosial-ekonomi petani cabai yang berpengaruh adalah umur, pendapatan, dan partisipasi terhadap pemberdayaan. Karakteristik sosial-ekonomi petani cabai yang tidak berpengaruh adalah pendidikan dan jumlah tanggungan keluarga terhadap pemberdayaan.	Objek Penelitian Subjek Penelitian Teori Penelitian Hasil Penelitian
2	Kharis Ragil Triyanto Jurnal Tahun 2016	Penelusuran Kebutuhan Secara Apresiatif (Apresiatif Inquiry) di Unit Pemukiman Transmigrasi Kolikapa Kecamatan	Kualitatif	Penelusuran Kebutuhan secara Apresiatif di daerah Transmigrasi dilakukan secara Apresiatif, dengan menemukan potensi UPT dan merekomendasikan rencana pelatihan untuk ditindaklanjuti.	Objek dan Subjek Penelitian Teori Penelitian Hasil Penelitian

		Maukaro Kabupaten Ende NTT			
3	Penelitian yang dilakukan oleh Edna A. Robidas Jurnal Tahun 2017	Judul <i>The Relationship Between Community Gardening and Empowerment : a Study of Los Angeles Gardens</i> , mahasiswa Fakultas Politeknik Universitas Negeri California, Pomona	Kualitatif	dengan hasil menunjukkan hubungan yang jelas antara kebun masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat, namun penelitian ini tidak mampu untuk menentukan kausalitas, dengan kata lain, apakah kebun menciptakan pemberdayaan, atau Mereka yang terlibat dalam kebun masyarakat secara maksimal sudah diberdayakan.	- Objek dan Subjek Penelitian - Teori Penelitian - Hasil Penelitian
4	Dwiko Maxi Rianto Jurnal Tahun 2017	Pemberdayaan masyarakat melalui program keterampilan sentra kriya oleh rumah pintar atsiri	Kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program keterampilan sentra kriya oleh Rumah Pintar Atsiri sudah melalui tahapan	- Objek dan Subjek Penelitian - Teori Penelitian - Hasil Penelitian

		Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor		pemberdayaan. Diantara program yang dilakukan adalah pembuatan segala jenis kue kering dan minuman jamu seperti kunyit asam. serta merumuskan tujuan jangka pendek atau jangka panjang.	
5	Rivan Yarid Anbiya, Jurnal Tahun 2017	judul Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penggunaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi	Kualitatif	Mampu memberikan gambaran bagi pemerintah dalam melakukan penerapan dana desa dan dana desa dapat memperkuat ketahanan ekonomi daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian - Subjek Penelitian - Teori Penelitian - Hasil Penelitian

		Pada Desa Cukanggalih Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Tahun 2016)			
--	--	--	--	--	--

Dengan demikian dari beberapa penelitian tentang Pemberdayaan Masyarakat yang sudah ada sebelumnya tidak ada kesamaan dengan apa yang peneliti teliti, hal ini terlihat dari aspek subyek dan obyek penelitian pemberdayaan masyarakat dan ketahanan masyarakat yang peneliti tampilkan berbeda dengan penelitian terdahulu. Peneliti lebih menekankan pada aspek potensi yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber : Data yang diolah peneliti (2018)